

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU

Siti Hardiana^{1)*}, Ani Susanti²⁾, Abdul Hamid³⁾,

¹ Prodi. Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tadulako
sitahardiana545454@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tadulako
anisaqramullah@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas lingkungan hidup Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran tentang fenomena atau faktor permasalahan yang diteliti sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang . Teori yang digunakan adalah George C. Edward III dimana ada empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, secara umum pelaksanaan mengenai pengelolaan sampah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator hasil penelitian yang diantaranya aspek komunikasi terhadap sebagian masyarakat masih kurang, pada indikator transmisi dapat dilihat bahwa penyebaran kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi penyampaian terkait informasi dan kejelasan tentang pengelolaan sampah ini masih belum efektif. Sumber daya manusia yang masih kurang, anggaran dana operasional terkait sub kegiatan atau program persampahan yang belum mencukupi, juga fasilitas penunjang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan seperti TPS, TPS3R, serta armada angkut sampah yang belum memadai, Disposisi atau sikap pelaksana sudah baik karena implementor kebijakan telah melaksanakan tugasnya dan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah yang baik. Adapun saran agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berjalan dengan baik, maka Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan komunikasi yaitu pada bagian transmisi atau penyebaran informasi secara merata kepada masyarakat. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberikan pelatihan- pelatihan khusus terkait pengelolaan sampah kepada staf agar mampu melakukan tugasnya dengan lebih optimal dan perlu menambah sarana dan prasarana seperti armada angkut sampah dan ketersediaan TPS, TPS 3R. Dan bagi masyarakat disarankan perlu adanya kesadaran agar peduli dengan pengelolaan sampah di Kota Palu.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan sampah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

This study aims to determine the implementation of waste management policies at the Environmental Service of Palu City. The research method used is descriptive qualitative, which provides an overview of the phenomena or factors of the problem under study according to existing facts. Data collection techniques are observation, in-depth informant interviews and documentation to collect data. Informants in this study amounted to 7 people. The theory used is George C. Edward III where there are four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of waste management policies at the Environmental Service of Palu City, in general, the implementation of waste management is quite good. This can be seen from the indicators of the research results, which include aspects of communication to some people that are still lacking, in the transmission indicator it can be seen that policy dissemination has been carried out by the government, but the delivery of information and clarity regarding waste management is still not effective. Human resources are still lacking, the budget for operational funds related to sub-activities or waste programs is insufficient, as well as facilities to support the success of policy implementation such as TPS, TPS 3R, and an inadequate waste transportation fleet, Dispositio or the attitude of implementers is good because policy implementers have carried out their duties and good standard operating procedures (SOP) for waste management. As for suggestions so that the implementation of waste management policies at the Palu City Environmental Service runs well, the Environmental Service must improve communication, namely in the transmission or dissemination of information evenly to the community. improve the quality of human resources by providing special training related to waste management to staff so that they are able to perform their duties more optimally and need to increase facilities and infrastructure such as waste transportation fleets and the availability of TPS, TPS 3R. And for the community it is recommended that there is a need for awareness to care about waste management in Palu City.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure*

Submisi: 08-08-2024

Diterima: 09-08-2024

Dipublikasikan: 30-08-2024

Negara Indonesia permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan besar. Dalam hal ini yang dimaksud permasalahan besar yaitu permasalahan sampah. Masalah sampah menjadi bahan sorotan disebagian besar kota, di Indonesia mempunyai masalah atau kendala dalam proses penanganan atau pengelolaan sampah, terutama di bagian perkotaan, pengelolaan sampah masih terbilang sulit dan menantang (Hastuti, 2021).

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pelayanan dengan mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah. Adanya kebijakan pengelolaan sampah belum tentu efektif menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Tidak jarang instansi dan organisasi yang memiliki tanggungjawab dalam proses pengelolaan sampah memiliki kapasitas yang relatif rendah sehingga menyebabkan pengelolaan sampah tidak efektif dan berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan.

Menurut Wachid (2020) menjelaskan bahwa “Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun jika melihat data *Sustainable Waste* Indonesia (SWI) tahun 2017, hanya 7% dari jumlah tersebut yang didaur ulang, sedangkan 69% ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Parahnya lagi, 24% sisanya dibuang begitu saja.”

Perkembangan suatu perkotaan, tidak hanya membawa pengaruh positif Aktivitas perekonomian perkotaan akan tetapi memiliki pengaruh negatif yang dapat menimbulkan masalah. Salah satu pengaruh negatif yang diakibatkan dari adanya pembangunan perkotaan adalah Permasalahan pengelolaan sampah semakin kompleks. Dengan semakin kompleksnya wilayah perkotaan, Maka sampah muncul sebagai permasalahan yang tidak bisa dihindari Perhatian dan penanganan khusus. Pemrosesan dan manajemen sampah masih tetap rendah, salah satunya karena kebijakan atau Program pengelolaan juga kurang terintegrasi, kurangnya dukungan, dan partisipasi masyarakat, baik dunia usaha dan masyarakat (Rusmawaty, 2021).

Sampah yang tidak terkelolah dengan baik akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Pengelolaan sampah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.dengan dua tujuan utama yaitu pengurangan dan pengelolaan sampah. Meminimalkan sampah sesuai peraturan pemerintah mulai dari sumber timbulan sampah hingga tahap akhir pengelolaan sampah. Meminimalkan sampah memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penanganan permasalahan sampah.

Harapan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang sampah dari sekedar barang sisa yang tidak berguna menjadi sumber yang bernilai sangat penting. Pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pendekatan akhir, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir, perlu ditinggalkan. Sebuah paradigma baru telah muncul yang memandang sampah sebagai sumber daya ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk energi, kompos, pupuk, atau bahan

baku industri. Pengelolaan sampah yang komprehensif, dimulai dari hulu hingga hilir, melibatkan pemilahan, daur ulang, dan pengembalian ke lingkungan dengan aman. Paradigma baru ini mengedepankan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (Reduce), penggunaan kembali (Reuse), dan pendauran ulang (Recycle). Sementara penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Perubahan pandangan ini telah mengakibatkan perubahan dalam regulasi, sejalan dengan kondisi dan situasi saat ini. Sebagai contoh, di Kota Palu, ada revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, yang kemudian diakomodasi melalui Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Dimana tujuan revisi ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, mengubah sampah menjadi sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat dan kemajuan pelayanan yang efisien dan efektif.

Menurut data Dinas Lingkungan hidup kota Palu, rata-rata timbulan sampah harian kota Palu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 186 ton perhari. Sampah tersebut merupakan sampah dari 8 kecamatan yang ada di kota Palu. Kemudian pada tahun 2022, timbulan sampah di kota palu tercatat dengan total jumlah sebanyak 55.679 ton per tahun. Dari data tersebut tercatat kecamatan yang paling banyak menghasilkan sampah yaitu terletak pada Mantikulore dengan total 11.451 ton, tertinggi kedua yaitu kecamatan Palu Selatan dengan total 8.649 ton, kemudian tertinggi ketiga yaitu kecamatan Palu Timur dengan total 8.474 ton, kemudian kecamatan Palu Barat dengan total 8.472 ton, selanjutnya kecamatan Tatanga dengan total 5.731 ton, kecamatan Tawaeli dengan total 4.325 ton, kecamatan Ulujadi dengan total 4.312 ton, dan kecamatan terendah penghasil sampah pada tahun 2022 yaitu kecamatan Palu Utara dengan total 4.265 ton.

Proses pengelolaan sampah di kota Palu yaitu masyarakat tidak mengelompokkan sampah sesuai dengan sifat dan jenis sampah pada saat proses pengolahan sampah. Kemudian pemilahan sampah tetap dikerjakan oleh para pemulung, dan proses pemanfaatan serta pembuangan sampah berlangsung di tempat pembuangan akhir. Untuk kota Palu sendiri tempat pembuangan akhir terletak di Kawatuna, Kec Mantikulore.

Dinas Lingkungan Hidup Kota palu, (DLH) saat ini sudah menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan TPS 3R atau dikenal dengan tempat pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang tersedia di delapan lokasi yang ada di Kota Palu yaitu : TPS 3R Palupi, TPS 3R Petobo, TPS 3R Valangguni, TPS 3R Pengawu, TPS 3R Silae, TPS 3R Topantimali, TPS 3R Talise dan TPS 3R Tondo. TPS 3R ini dilengkapi dengan kendaraan operasional berupa satu Unit Kaisar yang digunakan petugas TPS 3R untuk mengangkut sampah yang tidak sempat dibawah ke TPS 3R. Jadwal Kaisar tersebut hanya berlangsung selama 3 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Kota Palu juga sudah menerapkan proses pelaporan tempat sampah full dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Dinas Lingkungan Hidup kota Palu memiliki sekitar 184 armada pengangkut sampah. Dari jumlah tersebut, terdapat 39 truk, 70 armada pick-up yang dikelola oleh kelurahan, dan 75 unit kaisar

yang beroperasi di setiap kelurahan di Kota Palu. Kemudian untuk jadwal atau waktu penjemputan sampah oleh petugas angkut sampah yaitu pada pukul 17.00-21.00 WITA.

Akan tetapi meskipun telah disediakan TPS 3R, armada angkut sampah dan jadwal pembuangan sampah oleh pemerintah namun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Palu karena sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan karena tidak mau membayar iuran retribusi sampah, serta masih kurangnya TPS, TPS 3R dan Armada pengangkut sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, dari hasil observasi awal oleh peneliti muncul beberapa permasalahan mengenai Pengelolaan Sampah, kemudian dikaitkan dengan Teori yang didefinisikan oleh George C. Edward III, dengan model pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari 4 indikator. Peneliti menemukan beberapa fakta yaitu (1) Komunikasi, Ditemukan bahwa penyebarluasan kebijakan kepada pelaksana atau Implementor kebijakan sudah tersosialisasikan, akan tetapi masih belum efektif. (2) Sumber daya, ditemukan bahwa belum memadainya fasilitas penunjang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan seperti TPS, TPS 3R, serta armada angkut sampah. (3) Disposisi, ditemukan bahwa Aktor kebijakan sudah memahami terhadap eksistensi, substansi dan urgensi kebijakan. (4) Struktur Birokrasi, dijelaskan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang digunakan sudah ada namun hanya diketahui oleh petugas lapangan dan UPT TPA Kawatuna.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori menurut Edward III yang terdiri dari empat aspek yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan yaitu alat perekaman dan pencatatan tertulis dari peneliti. Tahapan yang digunakan dalam analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian implementasi kebijakan fokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirancang dan disetujui diimplementasikan dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses, tantangan, dan hasil implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut.

Program pengelolaan sampah adalah sebuah kebijakan dari pemerintah dengan harapan mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah. Sebuah perubahan baru mengenai sampah yaitu mengedepankan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (Reduce), penggunaan kembali (Reuse), dan pendauran ulang (Recycle).

Sementara penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA.

Dalam sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dengan Teori Edward III dengan mengukur tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dari empat indikator meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat dilihat dari variabel komunikasi pada indikator transmisi bahwa penyebarluasan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi penyampaian terkait informasi dan kejelasan tentang pengelolaan sampah ini masih belum efektif karena sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahuinya. Kemudian masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut membayar iuran retribusi sampah dan membuang sampahnya di TPS liar.

Aspek Sumber daya, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas lingkungan hidup kota Palu masih kurang, anggaran dana operasional terkait sub kegiatan atau program persampahan yang belum mencukupi, juga fasilitas penunjang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan seperti TPS, TPS 3R, serta armada angkut sampah yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihasilkan diatas hanya tersedia 8 TPS 3R di 46 kelurahan yang ada di Kota Palu, jumlah TPS bak amroll dan TPS bak mobile yang masih kurang serta sebagian TPS tersebut mengalami kerusakan dan Armada angkut sampah yang masih kurang.

Aspek Disposisi, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana sudah baik. Para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Pada variabel struktur birokrasi, peneliti melihat bahwa *Standar Operating prosedurs* (SOP) tentang pengelolaan sampah sudah baik, dapat dilihat dari alur pelayanan pengangkutan sampah yang berada di lorong-lorong, kemudin alur pelayanan pengangkutan sampah yang berada di jalan poros serta alur pengelolaan sampah yang ada di UPT TPA Kawatuna., meskipun dari hasil wawancara didapatkan bahwa masyarakat tidak mengetahui terkait SOP pengelolaan sampah.

Melalui hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintah, seharusnya tanggung jawab mengenai pengelolaan sampah ini bukan hanya sekedar tugas pemerintah dan tim pelaksana, akan tetapi masyarakat juga berperan penting didalamnya karena masyarakat adalah penghasil terbesar produksi sampah setiap harinya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan menggunakan metode penelitian menurut Edward III, yaitu implementasi kebijakan ini sudah berjalan cukup baik meskipun belum efektif dan efisien, karena pada indikator komunikasi masih terdapat kekurangan, kemudian pada indikator sumberdaya juga yang masih belum memadai. Sehingga dari empat indikator implementasi menurut Edward III terdapat dua indikator yang sudah baik dan dua indikator yang cukup baik terkait dengan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

Penelitian implementasi kebijakan sangat penting karena membantu memastikan bahwa kebijakan yang baik dalam teori juga berhasil diterapkan di lapangan. Ini dapat mengidentifikasi praktik yang berhasil, hambatan yang harus diatasi, dan area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bahwa secara umum pelaksanaan mengenai pengelolaan sampah sudah cukup baik. Meskipun masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu komunikasi dan dukungan masyarakat yang kurang, belum memadainya sumber daya manusia berupa kemampuan aparatur pemerintah dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk keberhasilan kebijakan program pengelolaan sampah. Sehingga dari empat indikator implementasi menurut Edward III terdapat dua indikator yang sudah baik dan dua indikator yang cukup baik terkait dengan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101.
- Rusdin, R. Bte. 2021. Komunikasi Dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kota Palu. *Kinesik*, Volume 8, Nomor 1, Nomor 53-61. DOI: <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i1.144>
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management in Kudus Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

TENTANG PENULIS

A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Hardiana

Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 140

Tempat dan Tanggal Lahir : Ongka, 25 Juli 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Persatuan Sejati, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong

Nomor *Handphone* : 0822-7135-4935

Alamat Email : sitahardiana545454@gmail.com



B. Nama Orang Tua

Ayah : Rustam C Tjanampo

Ibu : Emi

C. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	SD Inpres 2 Ongka	2014
SMP	SMP Negeri 2 Bolano Lambunu	2017
SMA	SMA Negeri Ongka Malino	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako	2024